

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan peran Dinas Sosial Jawa Timur dalam pemberian izin pengangkatan anak secara langsung yang ada di Jawa Timur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu sebagai berikut :

1. Penilaian kelayakan

. Urutan pertama yang dilakukan Dinas Sosial Jawa Timur yang memverifikasi dan membuatkan ceklist untuk menilai kelayakan dan kelengkapan permohonan dan disesuaikan dengan yang ada pada peraturan. Dan untuk memastikan dan meninjau dalam rangka menilai kelayakan calon orang tua, Dinas Sosial Jawa Timur melakukan kunjungan rumah yang digunakan sebagai bahan menyusun laporan sosial. Hal ini dilakukan untuk melakukan observasi kesesuaian dan kelayakan kondisi calon orang tua angkat secara riil. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek penilaian kelayakan, khususnya dalam pemenuhan persyaratan administratif oleh pemohon, masih memerlukan perhatian dan optimalisasi lebih lanjut. Keterbatasan informasi yang diterima pemohon mengenai detail prosedur, persyaratan dokumen, dan tahapan pengangkatan anak secara langsung menjadi salah satu hambatan yang menimbulkan kebingungan dan ketidaktepatan dalam penyusunan berkas. Ketidaklengkapan dokumen tersebut dapat berdampak pada terhambatnya proses verifikasi, mengurangi efisiensi

asesmen kelayakan, dan berpotensi memengaruhi hasil akhir penilaian terhadap kelayakann calon orang tua angkat.

2. Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah

Dinas Sosial Jawa Timur dapat dikatakan telah menjalankan perannya sebagai anggota Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Daerah sesuai dengan tugasnya yaitu penyelenggara sidang Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari dalam menjalankan perannya, Dinas Sosial Jawa Timur turut aktif menyampaikan hasil temuan selama menjalankan rentetan pemrosesan berkas dokumen serta laporan sosial calon orang tua yang permohonannya belum memenuhi kriteria kelayakan dan menjadi negoisor calon orang tua angkat. Selain itu membantu menindaklanjuti hasil sidang Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak bagi permohonan yang tidak dapat dilakukan secara mandiri untuk menghindari kesalahan informasi.

3. Penerbitan Surat

Dinas Sosial Jawa Timur menjalankan perannya sebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan dan Rekomendasi sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Dalam hal ini, Surat Keputusan dan Rekomendasi diberikan ketika seluruh permohonan dikatakan layak dengan melalui serangkaian proses yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, ketika putusan dalam menolak suatu permohonan juga telah diputuskan bersama-sama sehingga dengan mengeluarkan surat pernyataan permohonan tidak disetujui merupakan keputusan yang diambil secara matang dan bijak. Surat izin berupa Surat Keputusan dan Rekomendasi tersebut diberikan oleh Dinas Sosial

Jawa Timur kepada calon orang tua, pengadilan, dan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah disajikan dalam bentuk uraian sebelumnya, terdapat saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk kontribusi dalam penelitian ini. Kendati demikian, dalam menjalankan peran pemberian izin pengangkatan anak di Jawa Timur, secara keseluruhan peran yang dimainkan Dinas Sosial Jawa Timur telah cukup baik dalam memberikan keputusan izin atau tidaknya terkait pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur. Dengan demikian, penulis memberikan saran dengan maksud untuk meningkatkan kinerja peran dalam memproses permohonan pengangkatan anak secara langsung sebagai berikut :

1. Diperlukan upaya penguatan sistem informasi publik terkait prosedur dan persyaratan pengangkatan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang lebih lengkap, mudah diakses oleh publik, menarik, dan terstandarisasi. Hal ini dapat berupa website yang menjadi media atau wadah masyarakat yang melakukan permohonan pengangkatan anak mengetahui sejauh mana pengajuan permohonannya diproses. Sehingga transparansi pelayanan dapat dijalankan lebih optimal.
2. Pengoptimalan media sosial seperti Instagram terkait informasi pengangkatan anak, baik dalam bentuk atau panduan tertulis maupun berupa panduan video yang dapat membantu pemohon memahami alur pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur secara tepat dan terstruktur.